

**MODEL PELATIHAN DALAM PERBAIKAN KINERJA GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KOTA JAYAPURA**

**Marwan Sileuw¹
Syahrudin Usman²**

Siti Mania³

Muhammad Khalifah Mustamin⁴

Dosen Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua¹

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3,4}

Abstrak: Penelitian ini mengelaborasi tentang model pelatihan dalam perbaikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura dengan variabel perencanaan pelatihan, Jenis Kegiatan Pelaksanaan pelatihan, Metode pelatihan, materi pelatihan, penentuan instruktur, Jadwal pelatihan, Sarana Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Evaluasi pelatihan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Pendekatannya adalah fenomenologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Diklat, Widyaiswara BDK, Staf BDK, Ketua MGMP, Sekertaris MGMP, Guru PAI, Kepala Sekolah. Metode Pengumpulan data digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis datanya menggunakan yang disarankan oleh Miles dan Humberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Pelatihan yang di lakukan dalam perbaikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura yang oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua adalah mengarah kepada model klasik, yakni model yang dilakukan dengan memenuhi aspek perencanaan, teknik pelaksanaan, metode, pelatihan, materi pelatihan, Instruktur pelatihan, Penjadwalan, peserta pelatihan, dan evaluasi pelatihan.

Kata Kunci: Model Pelatihan; Kinerja Guru; Kota Jayapura

I. PENDAHULUAN

Guru adalah tenaga pendidikan yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain memberikan pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang paripurna.¹ Guru juga sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar.² Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 Butir 6 disebutkan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,

¹Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*, (Bandung: Refika, 2010), h. 43.

²Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik: Dasar-dasar Ilmu Mendidik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 182.

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.³

Keberhasilan pendidikan diukur pada seberapa besar kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya dalam membelajarkan peserta didik di sekolah. Karena itu guru harus eksis, berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Gurulah orang dewasa yang cerdas memberikan segalanya kepada peserta didiknya guna menjadi peserta didik yang tumbuh dan berkembang serta peka terhadap nikmat dan murkanya perkembangan zaman. Gurulah penyuguh pengetahuan, teladan dalam pribadi, jujur dalam berkata, lembut dalam bertindak, senyum dalam pergaulan, sabar dalam ujian, dan ikhlas dalam berbuat. Guru seperti yang digambarkan adalah menjadi harapan dan hakikat sesungguhnya dalam kehidupan pendidikan.

Kedudukan dan urgensinya guru sebagaimana diharapkan tidak dapat dielakkannya dalam menjalankan tugasnya/kinerjanya dan diyakini kualitasnya. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kedudukan dan perannya dalam menjalankan tugas/kinerja itu selalui diiringi pesatnya perkembangan zaman yang begitu cepat melaju. Karena itu, ia harus menyesuaikan dirinya baik secara jasmani maupun rohani dalam menghadapinya. Hal ini disebabkan karena tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan canggih. Misalnya dalam hal kurikulum, perubahan kurikulum dari suplemen 1994 menjadi kurikulum KBK 2003 dan kemudian dari kurikulum KBK berubah lagi menjadi KTSP, kemudian pemberlakuan Kurikulum-13 atau sering disebut K-13. Bahkan muncul wacana adanya kurikulum 2017. Setelah itu perkembangan pendidikan yang terkait teknologi yang diharapkan dan diusahakan agar setiap subjek pendidikan mampu mengoperasikan teknologi komputer dalam melakukan pembelajaran. Belum harapan dan usaha penyesuaian tersebut tuntas, timbul kebijakan baru yang menghendaki semua guru harus beralih status kualifikasi akademik serendah-rendah setara satu (S.1) dan seterusnya.

Selain itu pula, guru dituntut untuk membuat perangkat mengajar dengan sistem teknologi komputer, merancang pembelajaran dengan program power point. Membelajarkan peserta didik dengan menggunakan teknologi komputer, melakukan evaluasi dengan menggunakan teknologi komputer dan lain sebagainya. Ini semua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semarak saat-saat ini.

Fenomena yang menggorogoti kinerja guru akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan penggunaan komputer, laptop dan bahkan belajar dan pembelajaran lewat media internet. Di mana semua alat tersebut tidak hanya sebagai alat untuk bekerja, tetapi lebih dari dapat digunakan dan berguna sebagai sumber belajar. Artinya penggunaan dari alat atau media-media tersebut lebih meluas. Berkaitan dengan fungsi media atau alat-alat tersebut, Muhammad Khalifah Mustami dalam jurnal Internasionalnya berjudul "Inovasi model-model pembelajaran bidang Sains untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa" mengungkapkan bahwa:

³Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan*, (Direktora Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 5.

Model Pelatihan dalam Perbaikan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura

Penggunaan Komputer dalam pembelajaran sains sangat menguntungkan karena dapat memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kemampuannya dalam investigasi dan analisis. Sekaligus dapat membentuk pengetahuan dan pemahaman yang baru dalam melihat suatu permasalahan, serta mendapatkan cara pemecahan masalah melalui pembelajaran. Pembelajaran menggunakan Komputer sangat baik digunakan dalam pengumpulan, visualisasi dan analisis data sederhana dan kompleks. Dengan menggunakan Komputer, maka pengumpulan data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin, visualisasi data dilakukan bervariasi dan pengolahan data dapat dilakukan sangat cepat setelah mendapatkan data pengamatan dari percobaan laboratorium.⁴

Mencermati perkembangan alat-alat tersebut bahwa dengan perubahan-perubahan tersebut, menjadi tantangan besar terhadap kualitas kompetensi guru, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam, khususnya di Kota Jayapura. Tantangan dimaksud adalah berkaitan dengan status pendidikan guru, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA), dari diploma menjadi S-1, dari S-1 menjadi S-2, dan dari S-2 menjadi S-3. Persoalan kompetensi guru, bagaimana sehingga kompetensi guru terabdet mengiringi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Sehingga Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) merasa dirinyaterbelakang, tertinggal, lamban, tersaingi, dan kurang penting, tersisi, bahkan merasa minder.

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jayapura akan tertinggal kalau tidak ada pelatihan dan pendampingan padanya. Apabila tertinggal kompetensinya, tentu sangat berpengaruh besar terhadap kualitas kinerjanya sebagai pengajar dan pendidik di sekolah. Diyakini bahwa dengan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan akan berdampak pada perbaikan peningkatan kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas di kota Jayapura. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) berkaitan dengan kompetensi Pedagogiknya, Profesionalnya, kepribadiannya, dan sosialnya akan terjamin kualitasnya, bertahan, meningkat dan terabdet sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau sudah demikian, lebih diyakini bahwa kualitas kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Jayapura berkualitas, maksimal, dan optimal. Sehingga berdampak pada kualitas pendidikan dan pengajaran pada peserta didik tercapai hasil dan prestasi yang gemilang. Terwujudlah peserta didik yang menjadi generasi-generasi muda yang handal, berdaya saing, cerdas, dan berakhlak mulia.

Di Kota Jayapura telah ada dan berjalannya kegiatan-kegiatan dalam perbaikankinerja guru, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekitar wilayah Kota Jayapura. Kegiatan-kegiatan ini telah berbuat dan berkarya dalam pembinaan, pertahanan, dan peningkatan bagi kompetensi para guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Kota Jayapura. Kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut sangat dibutuhkan para Guru Pendidikan Agama

⁴Muhammad Khalifah Mustami, *Jurnal Internasional Lentera Pendidikan* (Vol. 12 No 2, Desember 2009), h. 130. Akses lewat Gogle, Senin 26 November 2018, jam 06.15 WIT.

Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura. Namun keberadaannya dan pelaksanaannya diistilahkan dengan “hidup segan mati pun tak mau”. Karena itu para guru hanya berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan demi bertahan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang silih berganti merenggut kompetensi yang dipunyai sebagai jadi dirinya dalam kinerjanya yakni mendidik dan mengajar di sekolah.

Di lain sisi, selain guru berusaha untuk memotivasi dirinya dalam melakukan perubahan dan peningkatan dalam perbaikan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut, adakah dukungan secara moril maupun material dari pihak yang memiliki tanggungjawab kepada para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah di Kota Jayapura. Misalnya kementerian agama Kota Jayapura, dinas Pendidikan kota Jayapura dan Kepala sekolah. Artinya merekalah yang mempunyai andil, tanggung jawab dan peran dalam mengayomi, mempertahankan dan atau memperbaiki kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Kementerian Agama kota Jayapura melalui Majelis Pendidikan Agama Islam (MAPEND AIS), Dinas Pendidikan Kota Jayapura, dan Kepala Sekolah yang sesungguhnya memiliki peran yang cukup, dalam melakukan perbaikan kinerja guru tersebut.

Sesuai observasi pendahuluan peneliti bahwa adanya model pelatihan dan pendampingan yang dilakukan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Jayapura. Model pelatihan dan model pendampingan dimaksud adalah adanya pembagian kelompok Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk belajar, berlatih, praktek sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan setiap bulan yang dipandu oleh ketua kelompok belajar.

Tulisan ini mengelaborasi tentang model pelatihan dalam perbaikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura dengan variabel perencanaan pelatihan, Jenis Kegiatan Pelaksanaan pelatihan, Metode pelatihan, materi pelatihan, penentuan instruktur, Jadwal pelatihan, Sarana Pelatihan, Peserta Pelatihan dan Evaluasi pelatihan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Istilah Pelatihan (*training*) berasal dari kata latih, yang mendapatkan awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi kata pelatihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai tempat berlatih, cara dan proses berlatih.⁵ Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan oleh para ahli dengan pandangan dan keahliannya. Adapun definisi para ahli tentang istilah pelatihan tersebut sebagai berikut:

- a. Dale Yoder menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan istilah pengembangan ditujukan untuk pegawai tingkat

⁵Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 420.

manajemen. Istilah yang dikemukakan oleh Dale adalah *rank and file training*, *supervision training*, dan *management development*.⁶

- b. Wexley dan Yukl mengemukakan bahwa *Training and development are terms referring to planned efforts designed facilitate the acquisition of relevant skill, knowledge and attitudes by organizational members*. (Pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana, yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Lanjut dikatakan bahwa *Development focusses more on improving the decision making and human relation skill of middle and upper level management while training involves lower level employees and the presentation of more factual and narrow subject matter*. (Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana).⁷

Berdasarkan definisi pelatihan sebagaimana dikemukakan para ahli di atas dapat dimaknai bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, organisasi, institusi, lembaga pendidikan, badan usaha, atau perusahaan atau lainnya secara terencana, sistematis, efektif dan efisien dalam bentuk bimbingan, arahan, tuntunan, latihan, dan didikan yang berfungsi membantu para peserta pelatihan memperoleh sejumlah pengetahuan, pengalaman, keterampilan maupun pematangan sikap, sifat, dan pribadi yang mulia sebagai modal dalam menjalani tugas dan atau bekerja. Dipastikan bahwa pelatihan dapat memberikan kontribusi besar kepada peserta pelatihan. Di mana segala kecemasan mereka, keraguan, mereka, rasa minder mereka, rasa tersaingi mereka, kekalutan mereka, rasa takut dan bahwa kemalasan mereka dapat terobati pada kegiatan-kegiatan pelatihan. Sifat, sikap, dan atau keadaan tersebut timbul pada diri karyawan, pengajar (pendidik) dalam melakukan tugasnya (bekerja) karena merasa tidak mempunyai ilmu, pengalaman dan keterampilan yang mumpuni menjadi bagian probelama dirinya.

Menurut Jejen Musafah, pelatihan berfungsi; a) kebutuhan guru pada pengetahuan dan keterampilan baru, b) guru harus memahami proses belajar, anak didik, dan juga memahami pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan yang lain, untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dalam mengajar, dan 3) guru disiapkan untuk sanggup menghadapi perubahan pada saat ini dan masa mendatang.⁸

Adapun kegiatan pendidikan, pelatihan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ondi Saondi dan Aris Suherman bahwa upaya meningkatkan profesionalisme guru, di antaranya melalui 1) peningkatan kualifikasi dan prasyarat jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, 2) program sertifikasi. Lanjut disebutkan bahwa 1) mengoptimalkan peran kegiatan dalam bentuk Pusat Kegiatan Guru (PKG), Kelompok

⁶A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), h. 49

⁷A.A. Anwar Prabu Mangku Negara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, h. 49.

⁸Jejan Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 129-130.

Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang memungkinkan para guru berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.⁹

Torington dan Tan menyebutkan beberapa jenis pelatihan sebagai proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Menurut mereka bahwa *training* sebagai sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terdiri atas beberapa jenis dan masing-masing jenis memiliki penekanan tujuan, terdiri atas *on the job training*, *off the job training*, *job rotation*, *management development*, dan *management education*.¹⁰

Lazimnya digunakan model pelatihan yang dilaksanakan, di antaranya model pelatihan Induktif, model pelatihan Deduktif, model pelatihan Klasik, sedangkan model pelatihan pengembangan di antaranya adalah model pelatihan keterampilan kerja, model pelatihan pengembangan strategi latihan, model pelatihan rancangan bangunan Latihan Evaluasi, model pelatihan Empat Langkah, model pelatihan, model pelatihan tujuh langkah, dan model pelatihan partisipasi.¹¹

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Pendekatannya adalah fenomenologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Diklat, Widyaiswara BDK, Staf BDK, Ketua MGMP, Sekertaris MGMP, Guru PAI, Kepala Sekolah. Metode Pengumpulan data digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis datanya menggunakan yang disarankan oleh Miles dan Humberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dibahas lebih jauh, perlu disebutkan 3 (tempat) instansi perolehan data penelitian ini yaitu; Balai Diklat Keagamaan Propinsi, Kementerian Agama Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kota Jayapura. Alasan penentuan 3 instansi tersebut, karena pelatihan yang bersentuhan langsung khusus untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah yang dilakukan oleh 3 (empat) instansi tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui pelatihan secara persis, yang sesuai dengan fokus pertama ini, maka data yang diambil adalah yang berkaitan dengan perencanaan pelatihan, Jenis kegiatan pelatihan, metode pelatihan, materi pelatihan, penentuan instruktur, jadwal pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan, peserta pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Pemaparan datanya sebagai berikut.

⁹Ondi Saondi dan Aris Hermawan, *Etika Profesi Keguruan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 29.

¹⁰Agustinus Herminto, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning*(Jakarta: Gramedia, 2013), h. 90.

¹¹Mustofa Kamil, *Kamilunkamil.blogspot.com*, diakses Sabtu, 1 Desember 2018

A. Perencanaan Kegiatan Pelatihan

Berkaitan dengan perencanaan tersebut, maka dilakukan wawancara kepada beberapa informan yakni M. Mochtar Tuhuteru (Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi),¹² Bambang Rudiyanto (Seksi Pendidikan dan pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua),¹³ Abdul Haris (Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Propinsi Papua),¹⁴ I bu Endang Triwahyuningsih (staf Kepala Seksi Kementerian Agama Propinsi Papua),¹⁵ M. Arif (bidang teknis pendidikan dan pelatihan LPMP Propinsi Papua),¹⁶ Ponto Yelepele (Bidang koordinator Widyaiswara LPMP)¹⁷, Marsiyem (Sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas¹⁸, Idam Setiawan¹⁹ yang pada intinya menjelaskan bahwa perencanaan dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah hal utama. Suatu organisasi, instansi baik instansi negeri maupun instansi swasta atau lembaga perguruan tinggi tentu punya perencanaan atas sesuatu yang dikerjakan. Berkaitan dengan perencanaan tersebut, maka sesuai dengan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa untuk lembaga Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua sebagai sebuah instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pendidikan dan pelatihan tentu melakukan perencanaan dalam setiap program kegiatan pelatihannya. Di mana kedua informan yang dilakukan wawancara kepadanya semakna dalam menyampaikan tentang adanya pembuatan perencanaan itu, bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua melakukan perencanaan dalam setiap program kerja atau kegiatan pelatihannya. Perencanaan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua adalah perencanaan yang dilakukan dalam pengusulan kegiatan di dalam DIPAnya. Rencana kegiatan yang diusulkan tersebut setelah diputuskan dalam pembahasan DIPA, maka Perencanaan kegiatan di dalam DIPA tersebut kemudian akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan di daerah atau instansi masing-masing. Perencanaan yang telah tersusun dalam DIPA tersebut direncanakan untuk kegiatan pelatihan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari informan Kementerian Agama Propinsi Papua, yakni dari dua informan itu, dalam keterangannya menggambarkan bahwa adanya kegiatan pembuatan perencanaan terhadap kegiatan pelatihan yang selama ini dilaksanakan. Kemudian juga hasil wawancara diperoleh dari LPMP Propinsi

¹²M. Mochtar Tuhuteru (44 Tahun), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018.

¹³Bambang Rudiyanto (51 Tahun), Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018

¹⁴Abdul Haris, (52 Tahun), Kasi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura,

¹⁵Endang Triwahyuningsih, (51 Tahun), Staf Kepala seksi Kementerian Agama Propinsi Papua,

¹⁶M. Arif, (34 Tahun), Selaku Bidang Teknis Pendidikan dan Pelatihan LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

¹⁷Ponto Yelepele (35 Tahun), Bidang koordinator Widyaiswara LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

¹⁸Marsiyem, (46 tahun), Sekertaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) kota Jayapura, *Wawancara*, Jayapura, 13 Desember 2018.

¹⁹Idam Setiawan, (41 tahun), Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) kota Jayapura, *Wawancara*, Jayapura, 12 Desember 2018

Papua, dari pernyataan kedua informan menggambarkan pula bahwa adanya perencanaan yang dibuat dalam melakukan suatu kegiatan pelatihan. Di mana perencanaan kegiatan pelatihan tersebut adalah merujuk kepada kegiatan yang tertera didana DIPA. Selanjutnya kegiatan pelatihan yang oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Dari paparan hasil wawancara yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa perencanaan untuk suatu kegiatan selalu dilakukan olehnya. Hanya saja, kegiatan pelatihan yang besar, yang membutuhkan dana besar belum pernah dilakukan. Tetapi untuk melakukan perencanaan dalam suatu kegiatan, adalah hal yang dilakukannya.

Perencanaan yang dilakukan dalam setiap program pelatihan adalah salah satu aspek mutlak yang dikehendaki dalam mengelola dan menjalankan organisasi, lembaga atau instansinya. Perencanaan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, oleh Kementerian Agama Propinsi Papua, oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura tersebut adalah untuk memudahkan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Perencanaan dalam suatu kegiatan pelatihan sangat penting, karena dengan perencanaan itu, apa, bagaimana, siapa dan kapan kegiatan pelatihan tersebut jelas diketahuinya. Berkaitan dengan pentingnya dilakukan perencanaan dalam setiap kegiatan itu sejalan dengan George R Terry mengatakan bahwa Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa: Perencanaan dapat menjawab di muka tentang: Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan dimasa depan dapat dilaksanakan. *Planning* yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang di hadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan. Dengan *planning* diharapkan mampu melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menyiapkan alat-alat darurat, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran.²¹

Di sisi lain bahwa perencanaan yang dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua yang didasarkan pada DIPA adalah jenis perencanaan pendekatan SP4 (Perencanaan, Penyusunan Program, dan Penganggaran). Pendekatan perencanaan ini merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Terkait dengan DIPA sebagai suatu perencanaan semisal pendekatan SP4 tersebut, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kost dan Roszenweig bahwa PPBS merupakan pendekatan yang sistematis yang berusaha menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk menemukan

²⁰George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta. Bumi Aksara.2012). h.46

²¹George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 47.

besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang.²²

Memperhatikan hasil wawancara dan teori tentang perencanaan yang diungkapkan oleh George R Terry tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua selalu melakukan perencanaan dalam melakukan kegiatan pelatihan. Perencanaan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam menunjang tercapainya kegiatan pelatihan yang dilakukan. Dengan perencanaan dilakukan, maka kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara teratur, efektif, efisien. Adapun, Perencanaan yang dilakukan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua adalah berdasarkan kurikulum yang sudah paten atau mata diklatnya. Dari mata Diklat yang sudah ada dalam pedoman tersebut hanya tinggal dipilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan setempat. Hanya saja perencanaan yang dibuatkan belum didasarkan kepada analisis kebutuhan. Sehingga mata diklat dan kegiatan pelatihan belum dapat direncanakan secara efektif dan maksimal terhadap kebutuhan.

B. Jenis Kegiatan Pelatihan

Untuk mengetahui jenis kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kota Jayapura, peneliti memperoleh data dari beberapa informan seperti Joko Waluyo (Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua),²³ Bambang Rudiyanto bagian seksi Pendidikan dan Pelatihan (Seksi Diklat),²⁴ Abdul Haris (Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Islam Propinsi Papua),²⁵ Endang Wahyuningsih (Staf Kepala seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Islam Propinsi Papua),²⁶ M. Arif (Kepala bagian teknis Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua)²⁷ dan hasil observasi diperoleh data bahwa aspek jenis kegiatan pelatihan juga menjadi bagian yang diperhatikan. Di mana pilihan jenis kegiatan pelatihan dalam suatu kegiatan pelatihan juga mempunyai peran cukup signifikan dalam mencapai suatu tujuan pelatihan.

²²Sarbini, Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 57.

²³Joko Waluyo, (37 tahun), Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018

²⁴Bambang Rudiyanto, (51 tahun), Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018.

²⁵Abdul Haris, (52 Tahun), Kasi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 18 Desember 2018

²⁶Endang Triwahyuningsih, (51 Tahun), Staf Kepala seksi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 18 Desember, 2018

²⁷Endang Triwahyuningsih, (51 Tahun), Staf Kepala seksi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 18 Desember 2018

²⁷M. Arif, (34 Tahun), Selaku Bidang Teknis Pendidikan dan Pelatihan LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

Banyak sekali jenis-jenis kegiatan pelatihan yang familiar yang dapat digunakan dalam mengantarkan peserta pelatihan untuk memperoleh suatu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam pelatihan. Di antara jenis-jenis kegiatan pelatihan tersebut yang digunakan dalam peningkatan kualitas (kompetensi) dan kinerja pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), *Workshop*, Pelatihan, Seminar, Diskusi Panel, Lokakarya, FGD Dan lain-lainnya. Jenis-jenis kegiatan pelatihan yang disebutkan ini memiliki peran yang cukup, dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kompetensi peserta pelatihan. Berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ondi Saondi dan Aris Suherman bahwa upaya meningkatkan profesionalisme guru, di antaranya melalui 1) peningkatan kualifikasi dan prasyarat jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, 2) program sertifikasi. Lanjut disebutkan bahwa 1) mengoptimalkan peran kegiatan dalam bentuk Pusat Kegiatan Guru (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang memungkinkan para guru berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang merka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.²⁸

Memperhatikan berbagai macam atau kegiatan pelatihan di atas, maka disimpulkan begitu banyak kegiatan pelatihan yang bergerak di setiap wilayah di Indonesia. Semua kegiatan tersebut memiliki satu visi, misi dan tujuan yakni tujuan mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diamanahkan negara lewat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4, dengan kalimat sederhana dan mengandung makna yang mendalam yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.²⁹ Juga disampaikan oleh Cara Stilling Candal menyarankan agar senantiasa diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman akademik, baik melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, atau bahkan mungkin mengikuti studi lanjut.³⁰

Memperhatikan hasil wawancara, observasi serta teori, konsep yang dijelaskan di atas berkaitan dengan penentuan, pemilihan dan atau penetapan suatu teknik pelatihan adalah sangat penting. Oleh karena itu, Balai pendidikan dan teknik pelaksanaan pelatihan sering dilakukan di kota Jayapura khususnya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua adalah lembaga yang dengan melakukan jenis kegiatan pelatihan dan jenis kegiatan *Workshop*. Kedua jenis kegiatan yang digunakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua merupakan rumpun dari jenis yang disampaikan oleh Saondi dan Aris. Di samping itu diperjelas oleh Cara Still Candal dengan menyebutkan pelatihan dan *Work Shop* yang harus dilalui guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman akademik. Sehingga jenis pelatihan yang digunakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua adalah efektif. Akan tetapi

²⁸Lihat Ondi Saondi dan Aris Hermawan, *Etika Profesi Keguruan*, h. 29.

²⁹Lihat Apollo Lestari, *Undang-Undang dasar Republik Indonesia (UUD'45) yang diamandemenkan dengan penjelasannya beserta susunan Kabinet Indonesia Bersatu II 45 Butir-butir Pancasila* (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h. 3.

³⁰Lihat Ondi Saondi dan Aris Hermawan, *Etika Profesi Keguruan*, h. 27.

hendaknya dilakukan secara rutin/continue serta maksimal. Artinya harus berorientasi lebih kepada praktek, bukan teori, sehingga benar-benar mampu menghasilkan suatu pelatihan yang memiliki manfaat besar bagi para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. selain itu, diperlukan jenis-jenis kegiatan lainnya yang mampu memecahkan permasalahan yang timbul dalam hal pelaksanaan pelatihan yang dilakukan. Di mana dalam penerapannya membutuhkan jenis kegiatan yang tepat, sehingga mampu membangun suasana pelatihan yang menyenangkan serta mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta pelatihan.

C. Metode Pelatihan yang digunakan dalam pelatihan

Setiap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan memiliki model/jenis yang beragam. Di mana metode dan jenis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Dengan metode pelatihan yang tepat, maka apa yang diharapkan atau dibutuhkan akan dapat tercapai. Begi pula sebaliknya bahwa metode yang dipakai pada suatu pelatihan tidak tepat, maka hasil atau kebutuhan yang diharapkan pun tidak akan tercapai dengan baik.

Terkadang juga metode pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di mana terkadang instruktur atau pemateri tidak memperhatikan keadaan atau kondisi dari peserta di dalam melakukan pelatihan. Berkaitan dengan metode atau jenis pelatihan tersebut, maka informan yang terdiri dari Muchtar Tuhuteru,³¹ Joko Waluyo,³² Abdul Haris,³³ Endang Wahyuningsih,³⁴ Ponto Yelepele,³⁵ M. Arif,³⁶ dapat diketahui bahwa metode pelatihan yang biasa digunakan pelatih atau narasumber dan Pelatih adalah metode yang familiar, yakni ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Di mana para informan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua mengatakan bahwa metode pelatihan yang digunakan adalah metode ceramah, simulasi. Hal yang semirip disampaikan oleh informan kedua, dan kemudian dilakukan observasi oleh peneliti sebagai pembuktian terhadap pengungkapan metode tersebut dan diperoleh data observasi bahwa pelatih pada pelatihan itu, menggunakan metode caramah, tanya jawab dan diskusi.

Metode pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa sejalan dengan Vietzhal Rivai Zainal tentang beberapa metode

³¹Muchtar Tuhuteru, (44 tahun), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018.

³²Joko Waluyo, (37 tahun), Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018.

³³M. Arif, (34 Tahun), Selaku Bidang Teknis Pendidikan dan Pelatihan LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019

³⁴Endang Triwahyuningsih, (51 Tahun), Staf Kepala seksi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 18 Desember 2018

³⁵Ponto Yelepele (35 Tahun), Kepala Seksi Tata Usaha LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

³⁶M. Arif, (34 Tahun), Selaku Bidang Teknis Pendidikan dan Pelatihan LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

yang dipakai dalam antaranya adalah; metode instruksi, Rotasi, Magang, Latihan, Ceramah, Video, Pelatihan Vetibule, Permainan Peran dan Model Perilaku, Case Study, simulasi, belajar mandiri dan proses belajar terprogram, praktik Laboratorium, role Playing, In Basket Technique, Management Games, *Behavior Modeling*, dan *Outdoor Oviented Programs*.³⁷

Memperhatikan hasil data wawancara, dokumentasi serta teori yang dijelaskan oleh Vietzhal Rivai Zainal tentang metode pelatihan, maka dapat dikatakan bahwa metode pelatihan baik yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua adalah metode pelatihan, yang berorientasi kepada peningkatan pengetahuan para guru di lingkungan Kementerian Agama baik Kabupaten maupun Kota, baik guru Madrasah, guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP)/ Stanawiyah (MTs) maupun ada di Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah (MA).

Metode pelatihan tersebut yakni metode, ceramah, tanya jawab, dan diskusi adalah tiga metode yang dianggap familiar, namun demikian hendaknya metode pelatihan yang digunakan harus bervariasi. Sehingga demikian, pelatihan tersebut mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan pengetahuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) baik dalam metode ceramah, diskusi dan tanya jawab yang memiliki manfaat masing-masing dalam menyampaikan pengetahuan para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura.

D. Materi Pelatihan bersesuaian dengan kebutuhan Guru

Agar tidak terjadi penyimpangan antara harapan dengan kenyataan, hendaknya setiap pelatihan baik yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua bersesuaian dengan kondisi yang ada (apa yang diinginkan) oleh peserta, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk mengetahui tentang apakah materi pelatihan bersesuaian dengan kebutuhan guru pendidikan agama Islam sekolah menengah atas di Kota Jayapura yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua secara paten terprogram secara struktur dalam kurikulumnya yakni satu sub Diklat Teknis Subtantif Pendidikan yakni Diklat Teknis Subtantif Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA/K. Kurikulum inilah kemudian diprogramkan dalam DIPA-nya yang disesuaikan dengan perkembangan perkembangan pengetahuan pendidikan dan keguruan.

Materi-materi pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua dapat dikatakan bahwa materi pelatihan yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan para guru Pendidikan Agama Islam. Di mana para guru diberikan pengetahuan yang berarti seperti membuat perangkat mengajar, metode, model pembelajaran *quantum Teaching Learnig, Lesson Stady*. Ini adalah materi-materi

³⁷Vietzhal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 175-178.

Model Pelatihan dalam Perbaikan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura

yang memperkuat guru dalam kinerjanya. Sementara bagi Kementerian Agama Propinsi Papua, tidak memiliki kurikulum mata Diklat hanya saja, kegiatan itu menjadi program rutinitas setiap tahun. Di mana kegiatan tersebut terprogram di dalam DIPA Kementerian Agama Propinsi Papua.

Berkaitan dengan pentingnya materi pelatihan yang harus didasarkan pada kebutuhan peserta pelatihan adalah karena memenuhi kebutuhan peserta pelatihan adalah salah satu ciri efektifitas sebagai ukuran tercapainya sasaran, sebagaimana Hamid Darmadi mengatakan bahwa materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dasar. Secara garis besar, bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa.³⁸ Lanjut bahwa materi pembelajaran perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran menyangkut jenis, cakupan, urutan, perlakuan (*treatment*) terhadap materi pembelajaran dan sumber bahan ajar.³⁹ Hal ini merupakan usaha dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, direncanakan dan dikehendaki sebelumnya oleh lembaga pelatihan. Di mana masukan yang diberikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papu, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua untuk dapat memberikan berbagai pelatihan kepada Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura sangat dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan yang timbul untuk dapat membuat sebuah pelatihan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Hanya saja materi-mamteri yang disajikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua tersebut masih minim. Di mana sekali setahun diprogramkan dan dilakukan dalam DIPA-nya bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua, juga kegiatannya tidak fokus pada satu bidang tetapi semua bidang dan intansi. Materi lain yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) pada tanggal 30 Juli 2019. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

³⁸Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 212.

³⁹Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 212

Gambar 4.2 Materi Lain bagi Pegawai pada BDK Propinsi Papua



Sumber Data: Dokumentasi BDK Propinsi papua 2019

Di sisi lain, materi-materi pelatihan tidak sekedar berkisar pada perangkat pembelajaran, penyusunan soal, tetapi mestinya ada materi-materi lain yang berhubungan dengan metodologi pebelajaran, strategi, model pembelajaran, Penelitian dan lainnya yang perlu dikembangkan. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam benar-benar pengetahuannya, pengalamannya, keterampilannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, maka kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) semakin baik dan berkualitas.

E. Penentuan Instruktur Pelatihan dan Pendampingan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelatihan adalah adanya instruktur yang profesional. Tanpa adanya instruktur yang profesional, sulit kiranya tujuan yang diinginkan bagi lembaga yang memberikan pelatihan dan pendampingan dapat terwujud. Begitu pula dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua yang selama ini memberikan pelatihan pada guru-guru di Kota Jayapura. Di mana membutuhkan instruktur yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan terlebih bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura.

Untuk mengetahui tentang penentuan instruktur pelatihan, berbagai penjelasan informan yang berkaitan dengan penentuan Instruktur pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua sangat dijunjung tinggi. Di mana penentuan dan penetapan instruktur, narasumber, dan atau widyaiswara dalam kegiatan pelatihan sangat urgen. Sebab ia mempunyai tugas untuk menanamkan, membekali dan membagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan bagi peserta pelatihan. Penentuan instruktur yang tidak tepat, akan berakibat kepada ketidakcapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, bahwa ketepatan dalam menentukan dan menetapkan instruktur pada suatu pelatihan, maka dapat mengantarkan seorang peserta pelatihan memenuhi kebutuhannya. Olehnya itu diperlukan widyaiswara yang kompeten dalam kompetensinya dan profesional dalam tugasnya. Hal yang penting dalam penentuan widyaiswara, instruktur atau pematiri dalam pelatihan terutama pada Balai Pendidikan dan pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, masih lebih berorientasi kepada

pemenuhan pelaksanaan kegiatan. Artinya yang penting ada instruktur, narasumber atau pemateri dalam mengisi kegiatan, penentuan tidak dilihat dari latar belakang kompetensinya.

Di sisi lain para instruktur, pemateri dan atau widyaiswara tersebut dalam menyampaikan materinya hanya berorientasi pada teoritis ketimbang praktek. Padahal pelatihan yang berorientasi kepada praktek lebih besar kontribusinya dan dapat diyakini penguasaan peserta pelatihan dalam menguasai dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelatihan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh E. Mulyasa bahwa kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan, dan sikap, namun yang terpenting adalah penerapan dalam suatu pekerjaan. Jadi dengan demikian kompetensi profesionalisme guru adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam merencanakan, membimbing, melatih, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya.⁴⁰

Sesuai dengan hasil data lapangan dari informan serta konsep yang di kemukakan oleh E. Mulyasa tersebut di atas menunjukkan bahwa masih sangat kurang pemateri-pemateri yang mampu memberikan pelatihan pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Jayapura. Sehingga kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam merencanakan, membimbing, mengarahkan, melatih serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya yang masih sangat kurang yang menyebabkan Balai Pendidikan dan Pelatihan masih melakukan pelatihan-pelatihan pada para widyaiswara, dan narasumber yang dimiliki untuk melakukan pelatihan dari luar Papua.

Juga dikatakan bahwa masih sering menggunakan instruktur dari luar Papua akibat dari kurangnya instruktur yang ada di Papua, sehingga membutuhkan biaya-biaya besar untuk mendatangkannya, kemudian bahwa instruktur/ widyaiswara dari luar Papua tidak memahami kondisi yang ada di Papua baik lingkungan dan budaya Papua. Sehingga efektifitas dari pelatihan pun terkadang tidak maksimal dilaksanakan. Diharapkan bahwa penetapan instruktur hendaknya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhan dari para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Di sisi lain yang sangat penting bahwa Instruktur atau narasumber/widyaiswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua masih perlu dibekali pengembangan strategi, metode, dan Model pembelajaran yang terintegrasi. Instrukturinya masih dini sebagai widyaiswara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, ketimbang Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua masih dini keberadaannya. Sehingga demikian keprofesionalannya masih kurang dalam mengelola pembelajaran dalam pelatihannya. Untuk itu, penentuan instruktur pada Balai pendidikan dan pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua dikatakan baik, tetapi belum sejalan dengan konsep yang dibangun oleh E. Mulyasa.

⁴⁰E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, h. 30

F. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan

Agar terlaksana dengan baik sebuah kegiatan, maka dibutuhkan apa yang dinamakan penjadwalan kegiatan. terlebih terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Penjadwalan yang terstruktur dengan baik akan memperkecil sebuah kesalahan yang mungkin bisa terjadi dalam sebuah kegiatan. Oleh karena itu, penjadwalan merupakan satu kesatuan dalam perencanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh sebuah lembaga terutama lembaga pemerintah, biasanya dalam merencanakan kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, namun terkadang perencanaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terlebih yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa data dari penjelasan informan yang berkaitan tentang jadwal pelaksanaan pelatihan yang dibuat oleh lembaga yang memberikan pelatihan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura dapat dikatakan bahwa penjadwalan kegiatan disusun berdasarkan rapat yang dilaksanakannya. Penjadwalan kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Di mana, dianggarkan setahun sekali yang diserahkan ke seksi pendidikan dan pelatihan keagamaan. Seksi pendidikan dan pelatihan diserahkan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan kegiatan, menyusun jadwal kegiatan, melaksanakannya dan mengevaluasi kegiatan pelatihan tersebut. Jadwal kegiatan disusun oleh seksi pendidikan dan pelatihan kemudian akan difinalkan dalam rapat. Penjadwalan merupakan sesuatu yang penting dan merupakan bagian dari perencanaan sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua.

Juga dilakukan hal yang sama oleh Kementerian Agama Propinsi Papua. Di mana berdasarkan data wawancara bahwa pembuatan jadwal tetap dilakukan untuk setiap kegiatan. Dengan jadwal itu narasumber dapat mengetahui kegiatan pelatihan tersebut. Jadwal yang dibuatkan didasarkan pada DIPAnya. Sedangkan kegiatan tersebut sudah direncanakan dilakukan pada minggu kedua bulan Desember. Selanjutnya bagi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua berdasarkan keterangan hasil wawancara bahwa melakukan penjadwaln kegiatan sejalan dengan yang dilakukan oleh Balai pendidikan dan Pelatihan keagamaan (BDK) Propinsi Papua dan Kementerian Agama Propinsi Papua.

Berkaitan dengan pentingnya pembuatan jadwal dalam suatu kegiatan pelatihan sebagai bagian dari perencanaan yang berfungsi mengoptimalkan segala aspek dalam kegiatan pelatihan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan H. Emerson dalam Soewarno Handayaniingrat mengatakan bahwa efektifitas sesuatu mempunyai makna tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya bila suatu sasaran dan tujuan tidak tercapai sesuai dengan rencana yang ada, maka tidak efektif.⁴¹ Juga dikatakan Peter Drucker dalam Kisdarto, bahwa efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat. Pendapat para ahli di atas dapat

⁴¹Soewarno Hamdayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, h. 16.

dijelaskan bahwa efektifitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.⁴² Oleh sebab itu, jadwal pelatihan adalah kegiatan untuk mendeskripsikan berbagai penjelasan yang berkaitan dengan salah satu tema yang ingin dibahas.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, konsep dan teori sebagaimana yang diungkapkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan setiap kegiatan selalu dibuatkan jadwal pelatihannya. Jadwal pelatihan yang dibuat, didasarkan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA). Yang membuat, menyusun jadwal pelatihan dan bertanggung jawab terhadap jadwal tersebut.

G. Sarana Prasarana Pelatihan

Berbagai penjelasan dari informan dengan metode wawancara dan observasi serta dokumentasi berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung pelatihan, maka dapat dikatakan bahwa untuk kegiatan pelatihan dan aktivitas kerja kantor oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua adalah dianggap baik, terutama kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua. Di mana sarana dan prasarana yang dipakai sampai ini dianggap baik dan layak, karena memiliki sarana prasarana secara mandiri. Sedangkan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua dan Kementerian Agama Propinsi Papua yang menggunakan Hotel dan lembaga atau instansi lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pelatihannya., terutama bagi Balai Diklat, yang aktivitas perkntorannya saatnya sampai saat ini digunakan gedung asrama haji.

Pemenuhan sarana dan prasaran pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua adalah aspek suatu keharusan dan kebutuhan. Di mana sarana dan prasarana dalam suatu instansi merupakan identitasnya lembaga atau instansi tersebut. Lebih dari itu, sarana dan prasarana sebagai alat yang dapat meningkatkan efektifitas kegiatan pelatihan. Hal ini sejalan dengan Rostiah NK yang mengatakan bahwa sarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.⁴⁴ Memperhatikan pemaparan hasil wawancara informan dan penjelasan Rostiah NK tentang sarana sebagai alat yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran. Maka dalam pelaksanaan pelatihan, sarana atau fasilitas sebagai alat yang digunakan dalam meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara instruktur, widyaiswar atau narasumber dengan peserta pelatihan.

⁴²Kisdarto, *Menuju SDM Berdaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 139.

⁴³<https://parkinerja.com>, *diakses*, Makasar, 27 September 2019.

⁴⁴N.K Rostiah, *Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 67

Dengan demikian bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua dalam melaksanakan kegiatan pelatihannya dikatakan bahwa baik, tetapi masih belum efektif. Di mana, fasilitas sarana dan prasarana untuk pelatihan dan perkantoran belum dimiliki secara mandiri. Ini berakibat kepada nilai efisiensi akan berkurang ketika menggunakan atau meminjam gedung lembaga lain, biaya lebih besar, bahkan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ketika tempat tersebut berpindah-pindah akibat digunakan oleh pemilik gedung, dan dapat mengganggu proses pembelajaran dan pelatihan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua. Artinya bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan dalam pelatihan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

H. Teknik Penentuan Peserta Pelatihan

Kegiatan yang dilakukan dalam sebuah instansi bukan hanya menentukan kepanitian saja, akan tetapi setelah kepanitian terbentuk, berikutnya adalah menentukan peserta kegiatan. Di mana peserta kegiatan ditentukan berdasarkan kebutuhan. Kegiatan yang mengundang peserta didik dari luar membutuhkan suatu keahlian khusus agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, maka dapat dikatakan bahwa yang berkaitan dengan teknik penentuan peserta pelatihan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura dapat dilakukan dengan cara menyurat secara resmi kepada Kementerian Agama Kota Jayapura, selanjutnya akan ditindak lanjuti surat tersebut kepada sekolah untuk mengusulkan nama-nama peserta pelatihannya kepada Kementerian Agama Kota Jayapura. Kemudian peserta yang diusulkan nama-nama dari sekolah tersebut kemudian diikutkan dalam pelatihan yang telah ditentukan jadwal pelatihan yang telah disampaikan. Untuk Kementerian Agama Propinsi Papua, merekrut peserta pelatihan langsung kepada dan atau ketua instansi menentukan pesertanya tersebut. Sedangkan khusus Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua melakukan perekrutan peserta pun dengan cara yang sama. Hanya saja yang pelatihan yang dilakukan itu adalah bukan untuk guru Agama Islam tetapi untuk semua guru umum dan pegawai umum lainnya.

Inti dari penentuan peserta pelatihan ini adalah karena tercipta komunikasi yang baik, sehingga dapat menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan kerjasama yang baik pula, baik Balai Diklat, Kementerian Agama Propinsi Papua, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua sekolah dan peserta pelatihan. Karena akibat dari hubungan-hubungan sosial yang mencakup kelompok-kelompok sosial, kategori-kategori sosial, dan memunculkan peran-peran sosial dari pelaksana kegiatan agar aktif dalam penentuan peserta kegiatan sehingga mampu merealisasikan kegiatan sesuai dengan harapan. Apa yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua adalah sebagai upaya dalam rangka memperoleh peserta pelatihan sebagai utusan dari sekolah atau satuan kerjanya. Peserta

pelatihan yang diutuskan tersebut adalah diyakini telah terpilih sebagai peserta dari sekolah. Di sisi lain lain bahwa peserta pelatihan yang statusnya sebagai pengajar yang seyogyanya tidak boleh meninggalkan tugas pokoknya secara legal diizinkan untuk dapat meninggalkan tugas pokoknya karena sebagai pelatihan. Penentuan peserta pelatihan seperti dimaksud adalah sejalan dengan konsep Balibang Agama dan Keagamaan Pusat bahwa peserta diklat sebagai input utama dalam kediklatan memegang peranan penting bagi keberhasilan program Diklat yang dilaksanakan. Keberagaman input utama ini mengharuskan Widyaiswara mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat dengan mengetahui kemampuan dasar peserta diklat.⁴⁵ Ada beberapa aspek dari karakteristik peserta yang perlu diketahui oleh Widyaiswara untuk mengetahui kemampuan dasar peserta di antaranya; latar belakang pendidikan, pengalaman terkait substansi Diklat, kemampuan dan keterampilan dasar, relevansi pekerjaan sehari-hari dengantujuan diklat, serta motivasi dan harapan setelah mengikuti kegiatan diklat.⁴⁶

Dengan demikian, merujuk pada cara penentuan peserta pelatihan dalam kegiatan pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua dianggap efektif dalam menentukan peserta pelatihan. Hanya saja, diperlukan penentuan peserta yang lebih intensif lagi, di mana penentuan peserta pelatihan itu diperhatikan kebutuhannya, pemerataan keikutsertaan peserta dalam kegiatan pelatihan, juga ketepatan dalam memenuhi kebutuhan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua.

I. Evaluasi Pelatihan

Berkaitan dengan evaluasi pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua tersebut di atas berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh, maka dikatakan bahwa terdapat pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan. Di mana evaluasi yang dilakukan itu ada 2 (dua) yaitu *pertama*, evaluasi terhadap keberhasilan pelatihan terhadap peserta didik yang dilakukan melalui tes tertulis dan *kedua* evaluasi terhadap keberhasilan panitia yang dilakukan melalui rapat evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Mengingat kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang penting yang dilakukan dalam perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kegiatan pelatihan. Sementara untuk Kementerian Agama Propinsi Papua, maka berdasarkan hasil wawancara, maka berbeda dengan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. di aman tidak dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan materi ajar, intrumen penilaian narasumber. Tetai melakukan evaluasi terhadap pelaksaan anggaran dan panitia dengan melalui rapat evaluasi.

⁴⁵Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan pengembangan Metodologi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan (Jakarta: Pusdiklat tenaga Teknis Keagamaan, 2003), h. 21.

⁴⁶Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan pengembangan Metodologi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan (Jakarta: Pusdiklat tenaga Teknis Keagamaan, 2003), h. 21-22.

Pelaksanaan evaluasi dalam setiap pelatihan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua tersebut sejalan dengan teori Roda Deming. Roda Deming, yaitu suatu teori yang berkaitan dengan roda yang terdiri dari empat langkah, yang berputar menurut jarum arah jam¹⁰. Keempat proses langkah tersebut adalah (1) perencanaan (*plan*), (2) pelaksanaan (*do*), (3) evaluasi (*check*), dan (4) tindakan penyempurnaan (*action*).

Berdasarkan hasil wawancara, dokumen dan teori-teori yang disampaikan, dapat dikatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BD) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua tersebut dapat dikatakan bahwa senantiasa melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihannya. Evaluasi yang dilakukan dalam mengukur keberhasilan peserta pelatihan terhadap pelatihan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja panitia pelaksana pelatihan. Evaluasi yang dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah baik, tetapi belum dikatakan optimal. Di mana evaluasi yang dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BK) itu hanya sebatas keberhasilan dalam menyelenggarakan pelatihan, bukan pada peningkatan keahlian dan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam memberikan materi pembelajaran di kelas, baik dari segi kemampuan wawasannya, sikap maupun dalam kemadiriannya.

Bagi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Papua dikatakan bahwa selain mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelatihan juga untuk keberhasilan peserta pelatihan. Sedangkan bagi Kementerian Agama Propinsi Papua hanya mengukur keberhasilan dan kekurangan yang ada pada panitia dalam melaksanakannya. Betapa pentingnya evaluasi karena merupakan bagian dari fungsi manajemen yang tidak dapat ditinggalkan dalam pencapaian keberhasilan sebuah kegiatan termasuk pelatihan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura. Sehingga demikian, evaluasi sangat penting dalam segala aktivitas.

Memperhatikan proses pelaksanaan pelatihan oleh 3 (tiga) instansi atau lembaga pelaksanaan pelatihan di Kota Jayapura yaitu baik yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Papua, yang didasarkan pada hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi serta merujuk pada teori, konsep tentang model-model pelatihan, maka dapat dihasilkan bahwa model pelatihan yang terlaksana saat ini di Jayapura adalah model pelatihan yang berorientasi pada model pelatihan Klasik. Model di mana dilakukan dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pelatihan baik kurikulum, kebutuhan peserta, kesiapan instruktur, modul, jadwal dana dan sebagainya. Suatu model pelatihan yang secara efektif dirancang terlebih dahulu. Kelebihan dari model pelatihan ini adalah dimudahkan belajar serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hanya saja model pelatihan Klasik ini belum secara optimal dilakukan.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model Pelatihan yang di lakukan dalam perbaikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura yang oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Propinsi Papua, Kementerian Agama Propinsi Papua adalah mengarah kepada model klasik, yakni model yang dilakukan dengan memenuhi aspek perencanaan, teknik pelaksanaan, metode, pelatihan, materi pelatihan, Instruktur pelatihan, Penjadwalan, peserta pelatihan, dan evaluasi pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apollo Lestari, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD'45) yang diamandemenkan dengan penjelasannya beserta susunan Kabinet Indonesia Bersatu II 45 Butir-butir Pancasila Surabaya: Apollo Lestari, 2009.
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan pengembangan Metodologi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan Jakarta: Pusdiklat tenaga Teknis Keagamaan, 2003.
- Darmadi, Hamid, *Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tantang Pendidikan*, Direktora Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Fathurrohman, Pupuh dan M. Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*, Bandung: Refika, 2010.
- Hamdayaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*.
- Herminto, Agustinus, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning* Jakarta: Gramedia, 2013.
- [https: Parkinerja.com](https://parkinerja.com), diakses, Makasar, 27 September 2019.
- Kisdarto, *Menuju SDM Berdaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Refika Aditama, 2011
- Musfah, Jijen, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Mustami, Muhammad Khalifah, *Jurnal Internasional Lentera Pendidikan*, Vol. 12 No 2, Desember 2009.
- Mustofa Kamil, *Kamilunkamil.blogspot.com*, diakses Sabtu, 1 Desember 2018

Salam, Burhanuddin, *Pengantar Pedagogik: Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Saondi, Ondi dan Aris Hermawan, *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sarbini, Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Terry, George R., *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta. Bumi Aksara.2012.

Zainal, Vietzhal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sumber Wawancara

M. Mochtar Tuhuteru (44 Tahun), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018.

Bambang Rudiyanto (51 Tahun), Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018

Abdul Haris, (52 Tahun), Kasi Kementerian Agama Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura,

Endang Triwahyuningsih, (51 Tahun), Staf Kepala seksi Kementerian Agama Propinsi Papua,

M. Arif, (34 Tahun), Selaku Bidang Teknis Pendidikan dan Pelatihan LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

Ponto Yelepele (35 Tahun), Bidang koordinator Widyaiswara LPMP Propinsi Papua, *Wawancara*, Jayapura, 30 April 2019.

Marsiyem, (46 tahun), Sekertaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) kota Jayapura, *Wawancara*, Jayapura, 13 Desember 2018.

Idam Setiawan, (41 tahun), Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) kota Jayapura, *Wawancara*, Jayapura, 12 Desember 2018

Joko Waluyo, (37 tahun), Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua, *Wawancara*, Jayapura, 11 Desember 2018